

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan Negara dalam tujuan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dimulai dengan memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan kegiatan tata kelola proses pemerintahan yang baik khususnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat dioptimalkan dengan maksimal agar mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Keempat regulasi tersebut cakupan dalam upaya pengelolaan keuangan pemerintah secara menyeluruh, baik pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntanbel dan transparan adalah dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar bisa menyajikan informasi yang dapat diakses, dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat dua lampiran. Pada Lampiran Pertama merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2014 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran II merupakan isi peraturan tentang Standar Pemerintah menggunakan dasar kas dalam rangka mencapai tujuan akrual sampai tahun 2014, yang mulai akan berlaku pada masa transisi yang belum siap menerapkan pelaksanaan SAP berdasarkan azas akrual, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Opini	2012	2013	2014	Jumlah	Persentase
WTP	9	6	6	21	20,0
WDP	25	25	25	75	71,4
WTP-DPP	1	4	4	9	8,6
Total				100	100

Dari tabel diatas menunjukkan hasil laporan keuangan pemerintah kota dan pemerintahan kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2012-2014 BPK memberikan 21 daerah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 75 daerah menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 9 daerah menerima WTP- Dengan Paragraf Penjelas.

Pemberian opini WDP tersebut menunjukkan arti bahwa item ketidakwajaran dalam item pengungkapan tertentu, namun hal ketidakwajaran yang tidak dapat

memberi pengaruh terhadap opini kewajaran penyajian laporan keuangan secara menyeluruh, maka jumlah kekurangan atau item kelemahan yang ada harus segera diperbaiki dalam kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kota/kab provinsi jawa tengah. Ada 4 hal yang mendasari petugas BPK pemberian opini WDP hasil temuan BPK, hasil opini yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, hasil pengungkapan kecukupan pengungkapan, sikap kepatuhan aparat pemerintah terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.

Pemerintah sebagai aparatur negara berkewajiban sebagai pelaksana yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan berbasis akrual sejak tahun 2015. Tantangan bagi pemerintah kota/kab. Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas SDM yang mengelola keuangan SKPD untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik sehingga diharapkan mendapatkan opini WTP dari pemeriksaan BPK. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik adalah dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Temuan audit adalah jumlah penyimpangan, atau pelanggaran dan perilaku menyimpang yang pernah ditemukan oleh auditor berdasarkan dari hasil pengungkapan temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor (Arifin & Fitriyani, 2014). Semakin banyak temuan audit yang didapatkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan persetujuan terhadap hasil rekomendasi BPK dalam melakukan kegiatan koreksi sehingga dapat meningkatkan jumlah pengungkapan

laporan keuangan. Semakin tinggi pengungkapan laporan keuangan maka tingkat probabilitas dari opini yang telah diperoleh akan semakin baik. Hasil penelitian Sari dkk. (2015), Penelitian Arifin dan Fitriyani (2014), Agusti (2014), Winanti (2014) menemukan bahwa jumlah temuan berpengaruh negatif terhadap variabel opini audit dalam hubungannya dalam mengungkapkan / tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Kualitas dari SDM dilihat berdasarkan kapasitas dan kemampuan dari operator yang melaksanakan pengelola keuangan Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai orang pemegang kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan pemda sekaligus pemegang aparat yang memegang kekuasaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan kepala daerah, yang proses selanjutnya pelaksanaan kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada pimpinan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah setempat dan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja aparat dari perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat yang menggunakan anggaran/pengguna barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Bila keberadaan dari jumlah satuan kerja dari suatu perangkat daerah pada pemerintah daerah yang diaudit akan menambah jumlah pemenuhan pengungkapan nominal jumlah laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar pengungkapan laporan keuangan akan berdampak pada probabilitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari tingkat pemerintah daerah. Penelitian Sari dkk. (2015), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menemukan bahwa

kapasitas operator pelaksana dalam kegiatan pengelola keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit terhadap tingkat pengungkapan LK pemerintah daerah.

Kualitas SDM dilihat dari latar pendidikan pemerintah daerah sebagai aparat pemegang kekuasaan dalam kegiatan pengelolaan dana keuangan daerah, kepala daerah diharapkan mampu untuk menyusun dan mampu menyajikan hasil laporan keuangan yang telah sesuai SAP (Setyaningrum, 2012). Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang diharapkan akan mempunyai informasi yang banyak dalam mengambil keputusan agar laporan keuangan menjadi berkualitas, jika jumlah pengungkapan laporan keuangan baik maka akan mendorong pemerintah daerah untuk berusaha meraih opini yang semakin baik tiap tahunnya. Kepala daerah yang mempunyai jabatan politik dan jumlahnya sangat sedikit dari orang profesional sehingga pada umumnya tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan master ilmu ekonomi akuntansi pemerintahan (Setyaningrum, 2015). Penelitian Sari dkk. (2015) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit melalui jumlah temuan pengungkapan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Model yang digunakan mengacu pada penelitian Sari dkk. (2015) akan tetapi terdapat perbedaan periode dan sampel penelitian. Tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 2012–2014 dan sampel penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sedangkan penelitian sebelumnya adalah tahun 2010 – 2013 dan sampel penelitian yang digunakan laporan keuangan kementerian/lembaga. Dengan demikian pada

penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP OPINI AUDIT MELALUI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian tersebut perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap tingkat pengungkapan LK Badan Pemeriksa keuangan?
3. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia dilihat dari kapasitas operator yang melakukan kegiatan pengelola keuangan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Badan Pemeriksa keuangan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia dilihat dari latar belakang pendidikan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan?
5. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap opini audit?
6. Bagaimana pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit?
7. Bagaimana pengaruh kualitas dari SDM dilihat dari kapasitas operator pengelola keuangan terhadap opini audit?
8. Bagaimana pengaruh kualitas dari SDM dilihat dari latar belakang pendidikan pemerintah daerah terhadap opini audit?

9. Bagaimana pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap opini audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diambil dari pemaparan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan, maka untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Tentang pengaruh hasil temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
2. Tentang pengaruh tindak lanjut hasil dari jumlah hasil pemeriksaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh kualitas sumber daya manusia dilihat dari kapasitas operator pengelola keuangan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
4. Pengaruh kualitas sumber daya manusia dilihat dari latar belakang pendidikan pimpinan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
5. Pengaruh temuan audit terhadap opini audit.
6. Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit.
7. Pengaruh kualitas SDM dilihat dari kapasitas operator yang bertugas mengelola keuangan terhadap opini audit.
8. Pengaruh kualitas sumber daya manusia dilihat dari latar belakang pendidikan pemerintah daerah terhadap pemberian opini audit.
9. Pengaruh tingkat pengungkapan dari hasil laporan keuangan terhadap opini audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan akademisi dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi pemerintah, ilmu akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan tingkat pelaporan dari hasil pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemda.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian ulang untuk mengetahui tingkat pengungkapan hasil dari pemeriksaan LK yang telah dikaji dan dilaporkan kepada BPK sesuai dengan Peraturan SAP.

b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengungkapkan laporan keuangan atas adanya temuan audit dalam mendeteksi kekeliruan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan auditor dalam memberikan opini audit.